

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dilaksanakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
12. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.

14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
16. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
18. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
20. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
21. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya.
22. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

24. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan /berkelompok.
25. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan keperawatan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
26. Surat Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.
27. Surat Izin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana pelayanan kesehatan.
28. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan Perorangan/berkelompok.
29. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
30. Toko obat adalah toko yang diberi izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
31. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Desa dan/atau dengan sebutan lain/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
33. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
34. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
35. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

sementara.

38. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
39. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
41. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.
42. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.
43. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
44. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busu racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
45. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
46. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
47. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
48. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
49. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
50. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

telekomunikasi khusus.

52. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
53. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
54. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
55. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
56. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
57. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
58. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
59. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
60. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
61. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
62. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
63. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

65. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
66. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
67. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
68. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
69. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
70. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
71. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
72. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
73. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
74. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
75. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
76. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya pengadaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
77. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

79. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
84. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini Terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan Kesehatan Medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. Konsultasi, pemeriksaan dan atau obat;
 - b. Tindakan medik;
 - c. Ambulan;
 - d. Perawatan Jenazah;
 - e. Diklat;
 - f. Laboratorium;
 - g. Radiologi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis Pelayanan yang diberikan, jenis bahan yang digunakan, dan jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan /kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sampah organik dan non organik.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan Persampahan/Kebersihan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah yang termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas jasa Penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir dan jangka waktu.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi, biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan, Penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik kendaraan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau uji emisi atau uji lengkap di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada :
 - a. Jenis dan berat kendaraan;
 - b. Biaya penggantian tanda uji berkala;
 - c. Penggantian buku uji berkala;
 - d. Penggantian tanda samping (stiker); dan
- (2) Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
 - a. Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal pembayaran retribusi;
 - b. Untuk kendaraan wajib uji emisi masa retribusi selama 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

Pasal 27

- (1) Denda atas kehilangan buku uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c dan denda atas keterlambatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf d, tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutang.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,

BAB VIII

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian/pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 32

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Bupati.

jasa, kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB IX

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembangunan Menara

Paragraf 1

Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
 - a. menjaga estitika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. meminimalisir gejolak sosial;
 - g. meningkatkan citra wilayah;
 - h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);

- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN dan lain-lain;
- o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;

Paragraf 2

Pembagian Zona

Pasal 35

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Zona Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 36

- (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi minimal 3 (tiga) menara dengan radius 400 (empat ratus) meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 38

Pembangunan menara Bersama telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. badan usaha swasta nasional;
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara diatas tanah.

Pasal 40

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.

- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak Ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Pembangunan menara Bersama Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 42

- (1) Menara Bersama Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , antara lain :
 - a. pertanahan (*grounding*)
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengamanan .
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Bersama Telekomunikasi;
 - b. penyedia Jasa konstruksi;

- f. luas area Menara Bersama telekomunikasi ;
- g. kapasitas listrik terpasang;
- h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
- i. data Telco operator yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
- j. nomor dan tanggal IMB; dan
- k. nomor dan tanggal Izin Gangguan.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 43

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 44

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara / pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;

- (3) Izin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi pengelolanya

Paragraf 7

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamouflase

Pasal 45

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi

Pasal 46

Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamouflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur Daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Penggunaan Menara Bersama

Pasal 47

Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi.

Pasal 48

Calon pengguna Menara Bersama telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan pertanggungjawaban ;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;

Pasal 49

- (1) Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

Bagian Ketiga

Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 50

- (1) Penyedia Menara Bersama telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama telekomunikasi diwajibkan untuk :
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - b. menyampaikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan .
- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 51

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antara Penyelenggaraan Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

dan penataan Menara Telekomunikasi (TP3MT).

- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan;
 - b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB).
 - c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
 - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ;
 - e. memberikan rekomendasi pemberian izin ;
 - f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
 - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara;
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara bersama telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 53

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi perusahaan menara bersama telekomunikasi
 - b. IMB Menara;
 - c. Izin Gangguan (HO) Menara; dan
 - d. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Perusahaan menara Bersama telekomunikasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya.

dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 55

- (1) IMB menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama telekomunikasi dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Selain mendirikan sebagaimana diatur pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Paragraf 2

Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 56

- (1) Izin operasional menara bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi ketinggian dari instansi yang berwenang;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
 - d. surat pernyataan persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah kepala keluarga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa/Lurah, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;

- f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengansuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi.
- g. surat kesanggupan membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Gambar teknis , meliputi:
 1. peta lokasi
 2. peta situasi lokasi
 3. site plan;
 4. denah bangunan 1:100
 5. tampak,potongan,rencana pondasi 1:100
 6. perhitungan struktur/konstruksi;
 7. uji penyelidikan tanah
 8. grounding (penangkal petir)
 9. titik koordinat (dari GPS)
- i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;
- j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi.
- k. surat kontak kerjasama paling sedikit 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan paling sedikit 2 (dua) operator untuk menara existing.

Pasal 57

- (1) Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT/ Instansi teknis terkait.

Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, b, c, dan d berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

Paragraf 4

Sewa Menara

Pasal 59

- (1) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau pengelola Menara Bersama telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 62

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai jual objek pajak Menara Telekomunikasi.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya pengendalian jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 65

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 67

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 68

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 69

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

Pasal 70

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 72

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi di tetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- d. Retribusi Pelayanan Pasar
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 76

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 81 didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Keberatan harus diajukan sebelum tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 78

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.

BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 86

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan menara telekomunikasi dan dengan sengaja tidak melaporkan informasi menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 87 merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV

PENYIDIK

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :


- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- tentang Retribusi Terminal;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribusi Pungutan Hasil Perikanan;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Perikanan;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatausahaan Perikanan;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatusahaan Perdagangan;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perfilman Dan Penggunaan Sistim Distribusi Entena Parabola (TV Kabel);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2007 tentang Retribusi Ketatusahaan Koperasi;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru
pada tanggal : 20 Mei 2014


JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT

Diundangkan di : Piru
pada tanggal : 27 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR
133

NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 2	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
	Huruf f	Cukup Jelas
	Huruf g	Cukup Jelas
Pasal 3		Cukup Jelas
Pasal 4	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
	Huruf f	Cukup Jelas
	Huruf g	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 5	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 6	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 8		Cukup Jelas
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 10	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas

Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 20 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 21 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat (1)	Cukup Jelas
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas

	Ayat (2)	
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
Pasal 27	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 28	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 29		Cukup Jelas
Pasal 30		Cukup Jelas
Pasal 31	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 32	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 33	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 34	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
	Huruf e	Cukup Jelas
	Huruf f	Cukup Jelas
	Huruf g	Cukup Jelas
	Huruf h	Cukup Jelas
	Huruf i	Cukup Jelas
	Huruf j	Cukup Jelas

	Huruf m	Cukup Jelas
	Huruf n	Cukup Jelas
	Huruf o	Cukup Jelas
	Huruf p	Cukup Jelas
Pasal 35	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 36	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 37	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
Pasal 38	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
Pasal 39	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 40	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 41	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas

	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Pasal 42 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Ayat (3)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Huruf k	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas

	Huruf g	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 45		Cukup Jelas
Pasal 46		Cukup Jelas
Pasal 47		Cukup Jelas
Pasal 48	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
Pasal 49 Ayat (1)		Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 50 Ayat (1)		Cukup Jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 51		Cukup Jelas
Pasal 52 Ayat (1)		Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
	Huruf e	Cukup Jelas
	Huruf f	Cukup Jelas
	Huruf g	Cukup Jelas
	Huruf h	Cukup Jelas

	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 54 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 55 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 56 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas

	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 58	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Cukup Jelas
Pasal 59	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 60		Cukup Jelas
Pasal 61	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 62		Cukup Jelas
Pasal 63	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 64	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 65		Cukup Jelas
Pasal 66	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 67	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 68	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 69	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas

Pasal 70 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 71 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 74	Huruf a Cukup Jelas
	Huruf b Cukup Jelas
	Huruf c Cukup Jelas
	Huruf d Cukup Jelas
	Huruf e Cukup Jelas
	Huruf f Cukup Jelas
	Huruf g Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 77 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas

Pasal 78 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 79 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 80 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 81 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas
Ayat (7)	Cukup Jelas
Pasal 82 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 83 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 84 Ayat (1)	Cukup Jelas

	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 85 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 86 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 89 Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Huruf k	Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas
Huruf e Cukup Jelas
Huruf f Cukup Jelas
Huruf g Cukup Jelas
Huruf h Cukup Jelas
Huruf i Cukup Jelas
Huruf j Cukup Jelas
Huruf k Cukup Jelas
Huruf l Cukup Jelas
Huruf m Cukup Jelas
Huruf n Cukup Jelas
Huruf o Cukup Jelas
Huruf p Cukup Jelas
Huruf q Cukup Jelas
Huruf r Cukup Jelas
Huruf s Cukup Jelas
Huruf t Cukup Jelas
Huruf u Cukup Jelas
Cukup Jelas

Pasal 91

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014
NOMOR 0135

TENTANG : Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan.

TARIF REKAM MEDIS

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pasien Baru	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	
2	Kunjungi Utang	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000	
3	Pembuatan Kartu RM	Rp 1,000	Rp 4,000	Rp 5,000	

TARIF POLIKLINIK

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan dokter umum	17,500	7,500	Rp 25,000	
2	Pemeriksaan dokter spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
3	Konsul Spesialis interen poliklinik	24,500	10,500	Rp 35,000	

TARIF KLINIK FISIOTERAPI

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
Rawat Jalan					
1	Tindakan dengan 1 alat	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
2	Tindakan dengan 2 alat	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
3	Tindakan dengan 3 alat	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
4	Exsersice Ringan	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
5	Exsersice Berat	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
6	Tindakan dengan 3 alat + Exercise	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
Rawat Mondok Kls III					
1	Tindakan dengan 1 alat	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
2	Tindakan dengan 2 alat	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
3	Tindakan dengan 3 alat	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
4	Exsersice Ringan	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
5	Exsersice Berat	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
6	Tindakan dengan 3 alat + Exercise	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
Rawat Mondok Kls II dan Kls					
1	Tindakan dengan 1 alat	24000	Rp 16,000	Rp 40,000	
2	Tindakan dengan 2 alat	24000	Rp 16,000	Rp 40,000	
3	Tindakan dengan 3 alat	30000	Rp 20,000	Rp 50,000	
4	Exsersice Ringan	15000	Rp 9,500	Rp 25,000	
5	Exsersice Berat	18000	Rp 11,000	Rp 30,000	
6	Tindakan dengan 3 alat + Exercise	30000	Rp 20,000	Rp 50,000	

1	Pemeriksaan dokter Spesialis	30000	Rp 20,000	Rp 50,000	
2	ESWT 3 x Terapi	900000	Rp 600,000	Rp 1,500,000	

TARIF UGD

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket	
1	RM Pasien	7,000	3,000	Rp 10,000	luar jam dinas	
1	Pemeriksaan Umum	21,000	9,000	Rp 30,000		
2	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000		
3	Tindakan	17,500	7,500	Rp 25,000		
	a. Medikasi sedang					
	b. Medikasi berat	18,000	12,000	Rp 30,000		
	Medikasi Kecil	27,000	18,000	Rp 45,000		
	c. Hecting 1-2	12,000	8,000	Rp 20,000		
	d. Hecting 3-5	18,000	11,000	Rp 30,000		
	hecting (> 5/ 1 Jaitan)	30,000	20,000	Rp 50,000		
	e. Aff hecting kecil (1-4)	4,500	3,000	Rp 7,500		
	f. Aff hecting sedang (5-10)	9,000	6,000	Rp 15,000		
	g. Aff hecting berat (>10)	12,000	8,000	Rp 20,000		
	h. Insisi abses i.	18,000	11,000	Rp 30,000		
	Ekg	36,000	24,000	Rp 60,000		
	j. EKG Monitor	24,000	16,000	Rp 40,000		
	k. Pasang infus	45,000	30,000	Rp 75,000		
	l. Pasang Tampon Sederhana	15,000	10,000	Rp 25,000		
	m. Pasang NGT	12,000	8,000	Rp 20,000		
	n. Pasang Kateter	18,000	11,000	Rp 30,000		
	o. Nebulizer	15,000	10,000	Rp 25,000		
	p. Cross Insisi	18,000	11,000	Rp 30,000		
	q. Kontrol luka sedang	24,000	16,000	Rp 40,000		Max Tarif 2X dlm sehr
	r. Kontrol luka berat	15,000	10,000	Rp 25,000		
	s. Ekstraksi kuku t.	30,000	20,000	Rp 50,000		
	Intubasi	48,000	32,000	Rp 80,000		
	u. Pemasangan gips sirkuler	133,500	89,000	Rp 222,500		
	v. Pemasangan Black slape	210,000	140,000	Rp 350,000		
	w. Pemasangan ransel verban	105,000	88,000	Rp 175,000		
	x. DC shock	30,000	20,000	Rp 50,000		
	y. Kumbah lambung	90,000	60,000	Rp 150,000		
	z. Kumbah lambung	30,000	20,000	Rp 50,000		
	aa. Eksplere luka	30,000	20,000	Rp 50,000		
	bb. Venaseksi	105,000	70,000	Rp 175,000		
	bb. Evakuasi corpus	30,000	20,000	Rp 50,000		
	cc. Rjp	45,000	30,000	Rp 75,000		

	dd. Observasi < 6 jam	54,000	36,000	Rp	90,000	Blm termshk Tarif pemeriksaan Dokter 2X
	ee. Observasi > 6 jam	4,500	3,000	Rp	7,500	
	ff. Injeksi/obat/hr	6,000	4,000	Rp	10,000	Max 50.000/hr
	gg. Skin test	12,000	8,000	Rp	20,000	
	hh. Suction/x	6,000	4,000	Rp	10,000	
	ii. GV Kecil	9,000	6,000	Rp	15,000	
	jj. GV Sedang	18,000	12,000	Rp	30,000	
	kk. GV Besar					
4	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)					
	a. BMHP kecil	3,000	7,000	Rp	10,000	
	b. BMHP sedang	4,500	10,500	Rp	15,000	
	c. BMHP berat	6,000	14,000	Rp	20,000	
	d. Oksigen	180	420	Rp	600	Oksigen 1Ltr/ Menit

TARIF KLINIK BEDAH

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. Biopsi lokal anestesi	210,000	140,000	Rp 350,000	
	b. Ekstirpasi	210,000	140,000	Rp 350,000	
	c. Rozer plasty	150,000	100,000	Rp 250,000	
	d. Sklerotisasi Hemoroid	150,000	100,000	Rp 250,000	
	e. Sirkumisi	150,000	100,000	Rp 250,000	
	f. Kista	150,000	100,000	Rp 250,000	
	g. Cauter Clavus	150,000	100,000	Rp 250,000	
	h. Fistulla	150,000	100,000	Rp 250,000	
	i. Fibroma	150,000	100,000	Rp 250,000	
	j. Haemangiom	210,000	140,000	Rp 350,000	
	k. Ganglion	210,000	140,000	Rp 350,000	
	l. Hecting sederhana	90,000	60,000	Rp 150,000	
	m. Repair Scar	150,000	100,000	Rp 250,000	
	n. Kista ateroma	210,000	140,000	Rp 350,000	
	o. Vena Seksi oleh dokter	150,000	100,000	Rp 250,000	
	p. Cauterisasi	150,000	100,000	Rp 250,000	
	q. Cautythrits	150,000	100,000	Rp 250,000	
	r. Paranichia	150,000	100,000	Rp 250,000	
	s. Keloid Bursitis	150,000	100,000	Rp 250,000	
	t. Angkat jahitan	30,000	20,000	Rp 50,000	
	u. Ganti balutan kecil	6,000	4,000	Rp 10,000	
	v. Ganti balutan sedang	9,000	6,000	Rp 15,000	
	w. Ganti balutan besar	18,000	12,000	Rp 30,000	
	x. Injeksi varises	45,000	30,000	Rp 75,000	
	y. Incisi Abses	90,000	60,000	Rp 150,000	
	z. Necrotomi	90,000	60,000	Rp 150,000	
	aa. Injeksi intraartkuler	30,000	30,000	Rp 50,000	

1	Pemeriksaan Spesialis	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. Nekrotomi	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000	
	b. Perawatan Luka diabetik	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000	
	c. Pungsi Asites	Rp 270,000	Rp 180,000	Rp 450,000	
	d. Pungsi Thyroid	Rp 270,000	Rp 180,000	Rp 450,000	
	e. Biopsi ginjal dan hepar	Rp 600,000	Rp 400,000	Rp 1,000,000	
	f. Sklerotomi	Rp 270,000	Rp 270,000	Rp 450,000	
	g. Gastroskopi	Rp 480,000	Rp 320,000	Rp 800,000	
	h. Colonoskopi	Rp 660,000	Rp 440,000	Rp 1,100,000	
	i. Ligasi	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 500,000	

TARIF KLINIK MATA

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. Refraksi	12,000	8,000	Rp 20,000	
	b. Tonometri	6,000	4,000	Rp 10,000	
	c. Biometri	48,000	32,000	Rp 80,000	
	d. Ekstirpasi corpus A. Konjung	15,000	10,000	Rp 25,000	
	e. Ekstirpasi c. a. Kornea	36,000	24,000	Rp 60,000	
	f. Epilasi	42,000	28,000	Rp 70,000	
	g. Incisi chalazion/Hordeolum	300,000	200,000	Rp 500,000	
	h. Annel Tes	12,000	8,000	Rp 20,000	
	i. Irigasi	15,000	10,000	Rp 25,000	
	j. Funduscopy Direct	6,000	4,000	Rp 10,000	
	k. Funduscopy Indirect	15,000	10,000	Rp 25,000	
	l. Goneskopi	15,000	10,000	Rp 25,000	
	m. Keratometri	6,000	4,000	Rp 10,000	
	n. Test BW/Ishihara	15,000	10,000	Rp 25,000	
	o. Test BW (Ishihara + Fransworth munsell test)	30,000	20,000	Rp 50,000	
	p. Aff jahitan kornea/per 1 benang	4,500	3,000	Rp 7,500	
	q. Jahit polpebra/kunjungtiva	9,000	6,000	Rp 15,000	
	r. Incisi	15,000	10,000	Rp 25,000	
	s. Aff jahitan biasa	4,200	2,800	Rp 7,000	
	t. USG Mata	30,000	20,000	Rp 50,000	

No		Pelayanan	Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. EEG	150,000	100,000	Rp 250,000	
	b. EMG konvensional	210,000	140,000	Rp 350,000	
	c. EMG Evoke Potensial	210,000	140,000	Rp 350,000	

TARIF KLINIK JANTUNG

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. Ekokardiografi/USG Jantung	165,000	110,000	Rp 275,000	
	b. Transesophageal-echocardiography	360,000	240,000	Rp 600,000	
	c. Stres test	240,000	160,000	Rp 400,000	
	d. Holter Monitor	150,000	100,000	Rp 250,000	
	e. EKG	48,000	32,000	Rp 80,000	
	f. Test Treadmill	165,000	110,000	Rp 275,000	

TARIF KLINIK ANAK

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	50,000	
2	Tindakan				
	a. Pungsi Lumbal	60,000	40,000	100,000	
	b. Nebulizer	24,000	16,000	40,000	Tanpa Obat
	c. Fototerapi/hari	90,000	60,000	150,000	Tanpa Obat

TARIF KLINIK PSIKIATRI

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. MMPI	150,000	100,000	Rp 250,000	
	b. Psikoterapi	60,000	40,000	Rp 100,000	
	c. Konsultasi Spesialis khusus	60,000	40,000	Rp 100,000	

1	Pemeriksaan Spesialis	50,000				
2	Tindakan					
	a. Nasoendoskopi	36,000	24,000	Rp	60,000	
	b. Biopsi cavum nasi	150,000	100,000	Rp	250,000	
	c. Biopsi Nasofarings	150,000	100,000	Rp	250,000	
	d. Biopsi tonsil/faring/mulut	150,000	100,000	Rp	250,000	
	e. Biopsi tumor colli	210,000	140,000	Rp	350,000	
	f. Buka tampon hidung	30,000	20,000	Rp	50,000	
	g. Buka Jahitan operasi	30,000	20,000	Rp	50,000	
	h. Kauterisasi Faring	90,000	60,000	Rp	150,000	
	i. Kauterisasi dan luksasi konka	150,000	100,000	Rp	250,000	
	j. Fiberoptic laringoscopy	45,000	30,000	Rp	75,000	
	k. Ekstraksi Corpus allenum	30,000	20,000	Rp	50,000	
	l. Ekstraksi serumen	15,000	10,000	Rp	25,000	Per Liang Telinga
	m. Ekstirpasi keloid telinga	210,000	140,000	Rp	350,000	
	n. Ekstirpasi Granulasi CAE	150,000	100,000	Rp	250,000	
	o. Insisi Abses	150,000	100,000	Rp	250,000	
	p. Insisi Sinus	180,000	120,000	Rp	300,000	
	q. PMT	60,000	40,000	Rp	100,000	
	r. Pasang tampon ballog	150,000	100,000	Rp	250,000	
	s. Pasang tampon hidung	30,000	20,000	Rp	50,000	Per Liang Telinga Per Liang Telinga
	t. Pasang tampon telinga	30,000	20,000	Rp	50,000	
	u. Polipektomi	420,000	350,000	Rp	700,000	
	v. Reposisi fraktur hidung	180,000	150,000	Rp	300,000	
	w. Spoelling CAE	15,000	12,500	Rp	25,000	Per Liang Telinga
	x. Trakeostomi	600,000	500,000	Rp	1,000,000	
	y. Labuloplasty	150,000	125,000	Rp	250,000	
	z. Punksi Hematome dan Bebat tekan	60,000	50,000	Rp	100,000	
	aa. Skin Prick test	240,000	200,000	Rp	400,000	
	bb. Ganti balutan	24,000	20,000	Rp	40,000	
		45,000	37,500	Rp	75,000	
		120,000	80,000	Rp	200,000	

TARIF KLINIK KULIT DAN KELAMIN

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	20,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. Bedah listrik kecil	60,000	50,000	Rp 100,000	
	b. Bedah listrik sedang	120,000	100,000	Rp 200,000	
	c. Bedah listrik besar	180,000	150,000	Rp 300,000	
	d. Injeksi Intralesi	45,000	37,500	Rp 75,000	
	e. Peeling kimiawi	60,000	50,000	Rp 100,000	
	f. Mikro Dermabrasi	150,000	125,000	Rp 250,000	
	g. Facial	30,000	25,000	Rp 50,000	
3	Sewa Alat Bedah Listrik	30,000	25,000	Rp 50,000	

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	PemeriksaanSpesialis	35,000	15,000	50,000	
2	Tindakan				
	a. Rik ANC + Ginekology	30,000	20,000	50,000	
	b. USG biasa	48,000	32,000	80,000	
	c. USG 3D/4D	150,000	100,000	250,000	
	d. USG transvaginal	-			
	e. Papsmear	75,000	50,000	125,000	Tanpa Px Laborat
	f. Pasang IUD (Dokter)	150,000	100,000	250,000	Tanpa alat KB
	g. Pasang IUD (Bidan)	90,000	60,000	150,000	Tanpa Penyulit
	h. Ekstraksi IUD (Dokter)	90,000	60,000	150,000	Dengan Penyulit
	i. Ekstraksi IUD (Dokter)	150,000	100,000	250,000	
	j. Ekstraksi IUD (Bidan)	60,000	40,000	100,000	
	k. Pasang Implant	150,000	100,000	250,000	Tanpa alat KB
	l. Cabut Implant	180,000	120,000	300,000	
	m. Suntik KB	18,000	12,000	30,000	Tanpa alat KB
	n. Pasang Laminaria	30,000	20,000	50,000	Tanpa alat
	o. Pasang pesamin	60,000	40,000	100,000	Tanpa alat
	p. Kolposkopi	90,000	60,000	150,000	
	q. CTG	30,000	20,000	50,000	

TARIF KLINIK PARU

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	50,000	
2	Tindakan				
	a. Punksi pleura	180,000	120,000	300,000	
	b. Spirometri	36,000	24,000	60,000	
	c. Test Alergi	60,000	40,000	100,000	
	d. Test Mantoux	36,000	24,000	60,000	
	e. Pasang WSD kecil	180,000	120,000	300,000	
	f. Pasang WSD besar	240,000	160,000	400,000	
	g. Uji Bronkodilator	36,000	24,000	60,000	
	h. Biopsi paru	600,000	400,000	1,000,000	
	i. Pencabutan WSD besar	60,000	40,000	100,000	
	j. Pleurodesis	75,000	50,000	125,000	
	k. Tindakan PFRate	24,000	16,000	40,000	
	l. Nebulizer	24,000	16,000	40,000	
	m. Bronkoskopi	570,000	380,000	950,000	

No	Uraian	Pelayanan	Rumah Sakit	Rumah Sakit	
1	Konsul gizi				
	- Dokter Spesialis	35,000	15,000	50,000	
	- Gizi Petugas	10,500	4,500	15,000	
2	Gizi Monitoring Gizi				
	- ranap Dokter Spesialis Gizi	21,000	9,000	30,000	
	- Petugas Gizi	3,500	1,500	5,000	
3	Monitoring Gizi Buruk				
	- Dokter Spesialis Gizi	24,500	10,500	35,000	
	- Petugas Gizi	7,000	3,000	10,000	

TARIF KLINIK PSIKOLOGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp 50,000	
2	Tindakan				
	a. Uraian psikologi lengkap	150,000	100,000	Rp 250,000	
	b. Uraian psikologi singkat	90,000	60,000	Rp 150,000	
	c. Tanpa uraian psikologi	60,000	40,000	Rp 100,000	

TARIF KLINIK GIGI DAN MULUT BIAYA PERAWATAN ORAL DIAGNOSA

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Pemeriksaan Gigi	17,500	7,500	Rp 25,000	
2	Pemeriksaan Lengkap (check Up)	21,000	9,000	Rp 30,000	
3	Kontrol Perawatan	10,500	4,500	Rp 15,000	
4	Tindakan				
	a. Ekstraksi tanpa suntik	18,000	12,000	Rp 30,000	
	b. Ekstraksi dg suntik citojet	60,000	40,000	Rp 100,000	
	c. Perawatan Dry Socket	60,000	40,000	Rp 100,000	
	d. Ekstraksi dengan komplikasi	90,000	60,000	Rp 150,000	
	e. Perawatan Dry Socket	45,000	30,000	Rp 75,000	

No	Uraian	Pelayanan	Rumah Sakit	Retribusi
1	Pemeriksaan Dokter Gigi	17,500	7,500	Rp 25,000
2	Check Up	21,000	9,000	Rp 30,000
3	Kontrol perawatan	10,500	4,500	Rp 15,000
4	Tindakan			
	a. Pembersihan gara gigi	60,000	40,000	Rp 100,000
	b. Pembersihan karang gigi banyak	210,000	140,000	Rp 350,000
	c. Occlusal Adjustment per segmen	60,000	40,000	Rp 100,000
	d. Currtage / region	60,000	40,000	Rp 100,000
	e. Frenectomy	300,000	200,000	Rp 500,000
	f. Gingivectomy/gingivoplasty	270,000	180,000	Rp 450,000
	g. Splinting & wiring / segment	300,000	200,000	Rp 500,000
	h. Operasi Flap operculectomy	150,000	100,000	Rp 250,000
	i. Buka Jahitan	30,000	30,000	Rp 50,000

**TARIF KLINIK GIGI DAN MULUT
BIAYA PERAWATAN ORTHODENTIE/KAWAT GIGI**

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Alat cekat orthodontie metal RA / RB Alat	3,000,000	2,000,000	Rp 5,000,000	
2	cekat orthodontie metal 1 rahang Alat	2,100,000	1,400,000	Rp 3,500,000	
3	cekat orthodontie estetik RA / RB Alat	4,500,000	3,000,000	Rp 7,500,000	
4	cekat orthodontie estetik 1 rahang	2,400,000	1,600,000	Rp 4,000,000	
5	Retalner RA + RB	300,000	200,000	Rp 500,000	
6	Retainer 1 rahang	150,000	100,000	Rp 250,000	
7	Retainer Infisible RA + B	480,000	320,000	Rp 800,000	
8	Retainer Infisible 1 rahang	240,000	160,000	Rp 400,000	
9	Kontrol	60,000	40,000	Rp 100,000	

TARIF AKUPUNKTUR

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Indikasi Sakit	28,000	12,000	Rp 40,000	
2	Pelangsingan/penggemukan	35,000	15,000	Rp 50,000	
3	Kosmetika	38,500	16,500	Rp 55,000	

1	Pemeriksaan Gigi	17,500	7,500	Rp 25,000
2	Check Up	21,000	9,000	Rp 30,000
3	Kontrol perawatan	10,500	4,500	Rp 15,000
4	Tindakan			
	a. Jacket crown akrilic	150,000	100,000	Rp 250,000
	b. Jacket crown metal akrilic	210,000	140,000	Rp 350,000
	c. Jacket crown all porcelen	900,000	600,000	Rp 1,500,000
	d. Tambalan sementara	18,000	12,000	Rp 30,000
	e. Tambalan GIC sedang	45,000	30,000	Rp 75,000
	f. Tambalan GIC besar	60,000	40,000	Rp 100,000
	g. Pulp kaping	12,000	8,000	Rp 20,000
	h. Pasak + GIC	78,000	52,000	Rp 130,000
	i. Pasak + Resin komposit	105,000	70,000	Rp 175,000
	j. Tumpatan sanwich	90,000	60,000	Rp 150,000
	k. Pin	450,000	300,000	Rp 750,000
	l. Inlay / only metal	240,000	160,000	Rp 400,000
	m. Inlay / only komposit direct	210,000	140,000	Rp 350,000
	n. Inlay / only komposit indirect	360,000	240,000	Rp 600,000
	o. Inlay / only porcelen	450,000	300,000	Rp 750,000
	p. Jacket crown metal porcelen	450,000	300,000	Rp 750,000
	q. Pin Dowel	120,000	80,000	Rp 200,000
	r. Dressing PSA	36,000	24,000	Rp 60,000
	s. PSA tunggal	60,000	40,000	Rp 100,000
	t. PSA ganda	90,000	60,000	Rp 150,000
	u. Pulpektomi tunggal	90,000	60,000	Rp 150,000
	v. Pulpektomi ganda	120,000	80,000	Rp 200,000
	w. Apeksifikasi tunggal	60,000	40,000	Rp 100,000
	x. Apeksifikasi ganda	72,000	48,000	Rp 120,000
	y. PSA 1x kunjungan	108,000	72,000	Rp 180,000
	z. Pengisian akar tunggal	60,000	40,000	Rp 100,000
	aa. Pengisian akat ganda	90,000	60,000	Rp 150,000
	bb. PSA ulang tunggal	60,000	40,000	Rp 100,000
	cc. PSA ulang ganda	90,000	60,000	Rp 150,000
	dd. Bongkar tambahan	18,000	12,000	Rp 30,000
	ee. Open bur + dressing	36,000	24,000	Rp 60,000
	ff. Tambalan resin komposit kecil	45,000	30,000	Rp 75,000
	gg. Tambahan resin komposit sedang	60,000	40,000	Rp 100,000
	hh. Tambahan resin komposit besar	90,000	60,000	Rp 150,000

1	Pemeriksaan Spesials	35,000	15,000	Rp	50,000	
2	Tindakan					
	a. Ekstraksi tanpa suntik	30,000	160,000	Rp	50,000	
	b. Ekstraksi dg suntik citojet	120,000	80,000	Rp	200,000	
	c. Ekstraksi dg suntik spuit	60,000	40,000	Rp	100,000	
	d. Ekstraksi dengan komplikasi	120,000	80,000	Rp	200,000	
	e. Perawatan Dry Socket	60,000	40,000	Rp	100,000	
	f. Operasi gigi IMPAKSI posisi A	300,000	200,000	Rp	500,000	
	g. Operasi gigi IMPAKSI posisi B	480,000	320,000	Rp	800,000	
	h. Operasi gigi IMPAKSI posisi C	600,000	400,000	Rp	1,000,000	
	i. Insisi Abses intra oral	120,000	620,000	Rp	200,000	
	j. Insisi Abses ekstrasi oral	120,000	620,000	Rp	200,000	
	k. Trepanasi	45,000	30,000	Rp	75,000	
	l. Apex resection	420,000	280,000	Rp	700,000	
	m. Enukliasi kista kecil	300,000	200,000	Rp	500,000	
	n. Enukliasi kista besar	480,000	320,000	Rp	800,000	
	o. Marsupliasi plugging ranula	300,000	200,000	Rp	500,000	
	p. Extirpation plugging ranula	420,000	280,000	Rp	700,000	
	q. Sequesterectomy	420,000	280,000	Rp	700,000	
	r. Alveolektomy per segmen	240,000	160,000	Rp	400,000	
	s. Vestibulo plasty/segment	240,000	160,000	Rp	400,000	
	t. Transplantasi gigi	900,000	600,000	Rp	1,500,000	Per gigi
	u. Replantasi	900,000	600,000	Rp	1,500,000	Per gigi
	v. Operculectomy	240,000	160,000	Rp	400,000	
	w. Frenectomy	300,000	200,000	Rp	500,000	
	x. Exicisi jaringan lunak < 1	300,000	200,000	Rp	500,000	
	y. Exicisi jaringan lunak > 1	420,000	280,000	Rp	700,000	
	z. Exicisi jaringan keras	900,000	600,000	Rp	1,500,000	
	aa. Biopsi	210,000	140,000	Rp	350,000	
	bb. Splinting fractur 1 rahang dg close reduction 1 rahan	720,000	480,000	Rp	1,200,000	
	cc. Splinting fractur 1 rahang dg open reduction (operasi)	1,800,000	1.200.000	Rp	3,000,000	
	dd. Implant 1 fixture	4,200,000	2.800.000	Rp	7,000,000	
	ee. Ekstirpasi gland salivary minor/Muscole	480,000	320,000	Rp	800,000	
	ff. Windowing gigi Impacted delay eruption	300,000	200,000	Rp	500,000	
	gg. Lasso	480,000	320,000	Rp	800,000	
	hh. Buka jahitan	30,000	20,000	Rp	50,000	
	ii. Perawatan oro antral fistula dg operasi	450,000	300,000	Rp	750,000	
	jj. Perawatan oro antral fistula dg obat	540,000	360,000	Rp	900,000	
	kk. Epulis	360,000	240,000	Rp	600,000	

No		Pelayanan	Rumah Sakit	Retribusi	
1	Pemeriksaan Spesialis	35,000	15,000	Rp	50,000
2	Check Up lengkap	21,000	9,000	Rp	30,000
3	Tambalan				
	a. sementara	18,000	12,000	Rp	30,000
	b. GIC Kecil/sedang	24,000	16,000	Rp	40,000
	c. GIC Besar	36,000	24,000	Rp	60,000
	d. CR Kecil/sedang	90,000	60,000	Rp	150,000
	e. CR Besar	72,000	48,000	Rp	120,000
	f. Sandwich	60,000	40,000	Rp	100,000
4	Pulp Capping	12,000	8,000	Rp	20,000
5	Vital pulpatomy + GIC	54,000	36,000	Rp	90,000
6	Mortal pulpatomy + GIC	90,000	60,000	Rp	150,000
7	Temporar Crow	4,500	3,000	Rp	7,500
8	Permanent crown	210,000	140,000	Rp	350,000
9	Apexifikasi	60,000	40,000	Rp	100,000
10	Endodontic/dressing	36,000	24,000	Rp	60,000
11	Openbur	24,000	16,000	Rp	40,000
12	Ekstraksi tanpa anestesi	24,000	16,000	Rp	40,000
13	Ekstraksi dengan anestesi	36,000	24,000	Rp	60,000
14	Bongkar tambalan	15,000	10,000	Rp	25,000
15	Drainase pus/Incisi abses/curutage polip	90,000	60,000	Rp	150,000
16	Alat preventif sederhana RA+RB	960,000	640,000	Rp	1,600,000
17	Expansi Screw RA+RB	1,200,000	800,000	Rp	2,000,000
18	Alat ortho lepas RA+RB	1,200,000	800,000	Rp	2,000,000
19	Alat ortho cekak RA+RB	3,000,000	2,000,000	Rp	5,000,000
20	Fixaxi/Immobilisasi	180,000	120,000	Rp	300,000
21	Space maintaner plat + Space	360,000	240,000	Rp	600,000
22	Inclined bite plane	300,000	200,000	Rp	500,000
23	Bite block	600,000	400,000	Rp	1,000,000

TARIF KLINIK HEWAN

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	Konsultasi	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20,000	
2	Periksa + Suntik	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40,000	Diluar obat
3	Operasi Kecil	Rp 52.500	Rp 22.500	Rp 75,000	Diluar obat
4	OH (steril betina) untuk kucing	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100,000	Diluar obat

No	Uraian	Pelayanan	Rumah Sakit	Rumah Sakit	Rumah Sakit
1	Pemeriksaan spesialis	35,000	15,000	Rp	50,000
2	Tindakan				
	a. Urofometri	90,000	60,000	Rp	150,000
	b. Businasi	90,000	60,000	Rp	150,000
	c. Pasang catheter	30,000	20,000	Rp	50,000
	d. Lepas catheter	6,000	4,000	Rp	10,000
	e. GV				
	- GV kecil	6,000	4,000	Rp	10,000
	- GV sedang	9,000	6,000	Rp	15,000
	- GV besar	18,000	12,000	Rp	30,000
	f. ESWL				
	- kelas III	3,300,000	2,200,000	Rp	5,500,000
	- kelas II	3,600,000	2,400,000	Rp	6,000,000
	- kelas I	3,900,000	2,600,000	Rp	6,500,000
	- kelas VIP	4,200,000	2,800,000	Rp	7,000,000
	- kelas SVIP	4,800,000	3,200,000	Rp	8,000,000
3	Sewa Alat				
	a. Alat Urovlometri			Rp	50,000
	b. Alat Businasi			Rp	50,000
	c. Alat ESWL			Rp	3,500,000

TARIF HEMODIALISIS

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1	Pelayanan HD Tanpa Reuse				
	Dializer dengan Larutan Bicarbonat :				
	a. Kelas III	Rp 417,200	Rp 178,800	Rp	596,000
	b. Kelas II	Rp 431,900	Rp 185,100	Rp	617,000
	c. Kelas I	Rp 447,650	Rp 191,850	Rp	639,500
2	Pelayanan HD dengan Reuse				
	Dializer dengan Larutan Bicarbonat :				
	a. Kelas III	Rp 385,000	Rp 165,000	Rp	550,000
	b. Kelas II	Rp 399,700	Rp 171,300	Rp	571,000
	c. Kelas I	Rp 415,450	Rp 178,050	Rp	593,500
3	Pelayanan HDMalam	Rp 532,700	Rp 228,300	Rp	761,000
4	Pelayanan HD ICU / Minggu	Rp 539,700	Rp 231,300	Rp	771,000

1	PAKET A a. Foto thoraks b. Laboratorium - Darah rutin - Urine rutin	Rp 105,000	Rp 45,000	Rp 150,000	
2	PAKET B a. Fisik Diagnostik b. EKG c. Foto Thoraks d. Laboratorium - Darah rutin - Urine rutin	Rp 175,000	Rp 75,000	Rp 250,000	
3	PAKET C a. Fisik Diagnostik b. EKG c. Foto Thoraks d. Laboratorium - Darah rutin - Urine rutin - Gula darah n & 2 j pp - SGOT, SGPT - Urium e. Gigi f. Mata	Rp 280,000	Rp 120,000	Rp 400,000	Disediakan makan pagi
4	PAKET D a. Fisik Diagnostik b. EKG c. Foto thoraks d. Gigi e. Mata f. Laboratorium - Urium	Rp 420,000	Rp 180,000	Rp 600,000	Disediakan makan pagi

	<ul style="list-style-type: none"> - Darah rutin - Gula darah n & 2] pp - SGOT, SGPT - Urium - Serologi VDRL - Bilirubin - Protein - Albumin - Kolesterol - Triglisericid - HDL & LDL kolesterol - Asam urat - Creatinin 				
5	Surat Keterangan Kesehatan	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp	40,000
	a. Morpho				
	b. Evaluasi				

TARIF KLINIK ORTHOPEDI

No	Uralan	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Konsultasi	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
2	Pemasangan gips sirkuler	Rp 180,000	Rp 120,000	Rp 300,000	
3	Pemasangan back slab	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000	
4	Lepas gips sirkuler	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
5	Lepas back slab	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
6	Lepas K-wire lokal	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
7	Lepas K-wire	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
8	Ganti Verban				
	- GV kecil	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	- GV sedang	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	- GV besar	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
10	Hecting Aff				
	Aff hecting kecil	Rp 7,500	Rp 5,000	Rp 12,500	
	Aff hecting sedang	Rp 10,500	Rp 7,000	Rp 17,500	
	Aff hecting berat	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	

		Pelayanan	Roman Duka	Rendani	
	FASILITAS				
1	Kelas VIP	Rp 64,000	Rp 256,000	Rp 320,000	per hari
2	Kelas I	Rp 360,000	Rp 840,000	Rp 1,200,000	per hari
3	Kelas II	Rp 27,000	Rp 63,000	Rp 90,000	per hari
4	Kelas III	Rp 13,500	Rp 31,500	Rp 45,000	per hari
5	Bayi Perinatologi	Rp 45,000	Rp 105,000	Rp 150,000	per hari
6	Bayi Normal				1/2 Perawatan Ibu
	VISITE DOKTER				
1	Dokter Umum				
	a. Kelas III	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
	b. Kelas II	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 30,000	
	c. Kelas I	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
	d. VIP	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
2	Dokter Spesialis				
	a. Kelas III	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	b. Kelas II	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 60,000	
	c. Kelas I	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
	d. VIP	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 100,000	
	TINDAKAN PERAWATAN				
1	Pasang Infus	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
2	Pasang kateter	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
3	Pasang kateter kondom	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
4	Aff Katheter	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000	
5	Pasang NGT	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
6	Pasang Laminaria Tanpa Alat	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
7	Pasang Tampon Sederhana	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
8	Pemasangan gips serkuler	Rp 180,000	Rp 120,000	Rp 300,000	
9	Pemasangan black slape	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
10	Pemasangan ransel verban	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
11	Transfusi Darah	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
12	Hecting 1-2	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
13	Hecting 3-5	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
14	hecting (> 5/ 1 Jahitan)	Rp 4,500	Rp 3,000	Rp 7,500	
15	Aff hecting kecil (1-4)	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
16	Aff hecting sedang (5-10)	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
17	Aff hecting berat (>10)	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
18	Bilas lambung	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
19	Ekg	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
20	EKG monitor	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000	
21	Nebulizer	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	Max Tarif 2X dlm sehari
22	a. Injeksi intra artikuler	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
23	b. Injeksi (im, iv, sc, ic) obat/hari	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000	
24	c. Skin test (injeksi)	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
25	Suction/X	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	Max 50.000/hr
26	Vulva higiene	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
27	Skeren	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	

29	a. Kecil	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
30	b. Sedang	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
31	c. Besar	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
32	Pengambilan sampel darah/Plebo	Rp 7,000	Rp 3,000	Rp 10,000	
33	Pengambilan darah arteri	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
34	Insisi Abses	Rp 36,000	Rp 24,000	Rp 60,000	
35	Cross Insisi	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
36	Supra Pubic Punction	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
37	Lavement	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 30,000	
38	Toucher Rectal(RT)	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
39	Pipa Rectum	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
40	a Perawatan Luka/Medikasi Kecil	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
	b Perawatan Luka/Medikasi Sedang	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
	c Perawatan Luka/Medikasi berat	Rp 27,000	Rp 18,000	Rp 45,000	
41	Pengambilan sedfaan mukosa	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	Tanpa -Lab
42	Askep Pasien/hari				
	a. Kelas III	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
	b. Kelas II	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 30,000	
	c. Kelas I	Rp 31,500	Rp 13,500	Rp 45,000	
	d. VIP	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
43	RJP	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000	
44	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)				
	a. BMHP kecil	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	b. BMHP sedang	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	c. BMHP besar	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 600	
	d. Oksigen / jam	Rp 360	Rp 240		Oksigen 1Ltr/ Menit

Keterangan :

tarif tindakan disesuaikan dengan kelas perawatan pasien dengan kenaikan tarif sebesar 20 %

	FASILITAS				
1	Ruangan ACU	Rp 100,000	Rp 150,000	Rp 250,000	
	VISITE DOKTER				
1	Dokter Umum	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
2	Dokter Spesialis	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 100,000	
	ASUHAN KEPERAWATAN				
1	Asuhan Keperawatan	Rp 27,000	Rp 18,500	Rp 45,000	
	TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Kategori Kecil				
	a. Injeksi (IM, SC, IC)/obat/hari	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	b. Skin Test	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
	c. Suction/hari	Rp 36,000	Rp 24,000	Rp 60,000	
	d. Pemasangan Infus	Rp 21,000	Rp 14,000	Rp 35,000	
	e. Pengambilan sampel daerah/plebo	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
2	Kategori Sedang				
	a. Lavement	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	b. Pengambilan darah arteri	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	c. Pasangan kateter	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
	d. Aff Kateter	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	e. Pasang NGT	Rp 27,000	Rp 18,500	Rp 45,000	
	f. Nebulizer	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	g. EKG	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	h. Transfusi Darah	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	k. Infus Umbilicus	Rp 19,200	Rp 12,800	Rp 32,000	
	l. Pemasangan Syringe Pump/24 jam	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	m. Pemasangan Infus Pump/24 jam	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	n. Pemasangan saturasi/24 jam	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	o. Pemasangan be side monitor/4 jam	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	p. Bronchial toilet	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	q. Bantuan nafas manual/bagging/jam	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
3	Kategori Besar				
	a. Intubasi/pasang pipa ETT	Rp 140,000	Rp 60,000	Rp 200,000	
	b. Resusitasi jantung paru	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
	c. DC shock	Rp 105,000	Rp 45,000	Rp 150,000	
	d. Ektubasi	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
4	Kategori Khusus				
	a. Pemasangan WSD kecil	Rp 210,000	Rp 90,000	Rp 300,000	
	b. Pemasangan WSD besar	Rp 240,000	Rp 160,000	Rp 400,000	
	c. Lepas WSD	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
	d. Pemasangan ventilator/4jam	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	e. Vena Sectie	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000	

Max Tarif 2X dlm sehr

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI						
1	BMHP Kecil	Rp	3,000	Rp	7,000	Rp 10,000
2	BMHP Sedang	Rp	4,500	Rp	10,500	Rp 15,000
3	BMHP Besar	Rp	6,000	Rp	14,000	Rp 20,000
4	Oksigen/Manit	Rp	180	Rp	420	Rp 600
	SEWA ALAT					
1	Ventilator/hari					Rp 150,000
2	Syringe pump/hr					Rp 50,000
3	Infus pump/hr					Rp 50,000
4	Bed Side monitor/hr					Rp 100,000
5	Incubator/hr					Rp 50,000

Oksigen 1Ltr/ Menit

No	Uraian	Pelayanan	Rumah Sakit	Perawatan	Perawatan
	FASILITAS				
1	Kelas I	Rp 360,000	Rp 840,000	Rp 1,200,000	per hari
2	Kelas II	Rp 27,000	Rp 63,000	Rp 90,000	per hari
3	Kelas III	Rp 13,500	Rp 31,500	Rp 45,000	per hari
4	VIP	Rp 96,000	Rp 224,000	Rp 320,000	
5	Bayi Perinatologi	Rp 45,000	Rp 105,000	Rp 150,000	per hari
6	Bayi Normal				1/2 Perawatan Ibu
	VISITE DOKTER				
1	Dokter Umum	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
	a. Kelas III	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	di luar Hari Libur
	b. Kelas II	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 30,000	
	c. Kelas I	Rp 25,200	Rp 10,800	Rp 36,000	
	d. VIP	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
2	Dokter Spesialis				
	a. Kelas III	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	di luar Hari Libur
	b. Kelas II	Rp 42,000	Rp 18,000	Rp 60,000	
	c. Kelas I	Rp 45,500	Rp 19,500	Rp 65,000	
	d. VIP	Rp 63,000	Rp 27,000	Rp 90,000	
	TINDAKAN PERAWATAN				
1	Pasang Infus	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
2	Pasang kateter	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
3	Pasang Tampon kondom Kateter	Rp 60,000	Rp 30,000	Rp 75,000	
4	Pasang NGT	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
5	Pasang Laminaria Tanpa Alat	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
6	Pasang Tampon	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
7	Pemasangan gips serkuler	Rp 180,000	Rp 120,000	Rp 300,000	
8	Pemasangan black slape	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
9	Pemasangan ransel verban	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
10	Hecting 1-2	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
11	Hecting 3-4	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
12	Hecting 6-10	Rp 39,000	Rp 26,000	Rp 65,000	
13	Hecting 10-15	Rp 60,000	Rp 40,000	Rp 100,000	
14	Aff hecting kecil	Rp 7,500	Rp 5,000	Rp 12,500	
15	Aff hecting sedang	Rp 10,500	Rp 7,000	Rp 17,500	
16	Aff hecting berat	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
17	Bilas lambung	Rp 30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
18	Ekg	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
19	EKG monitor	Rp 45,000	Rp 30,000	Rp 75,000	
20	Nebulizer	Rp 24,000	Rp 16,000	Rp 40,000	
21	a. Injeksi intra artikuler	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
	b. Injeksi (im, iv, sc, ic) obat/hari	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 5,000	
	c. Skin test (injeksi)/ jenis Obat/Hari	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
22	Suction/x Hari	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	Max 50.000/per
23	Vulva higiene	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
24	Skeren	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
25	Tindik	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	

27	Cross Insisi	Rp 24,000	Rp 10,000	Rp 10,000	
28	Ganti Verban				
	a. Kecil	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	b. Sedang	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	c. Besar	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
29	Vaksinasi BCG	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
30	Vaksinasi Hepatitis B/DPT/Campak	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
31	Vaksin PPD Test	Rp 7,200	Rp 4,800	Rp 12,000	
32	PERAWATAN LUKA				
	a. Perawatan Luka/Medikasi kecil	Rp 12,000	Rp 8,000	Rp 20,000	
	b. Perawatan Luka/Medikasi sedang	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
	c. Perawatan Luka/Medikasi berat	Rp 27,000	Rp 18,000	Rp 45,000	
	d. Perawatan Payudara/hr	Rp 15,000	Rp 10,000	Rp 25,000	
33	Toucher vaginal(VT)/4jam a				
	Dokter	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
	b Bidan	Rp 10,500	Rp 4,500	Rp 15,000	Max 45.000/hr
34	Supra Pubic Punction	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
35	Pengambilan darah arteri	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
36	Lavement	Rp 21,000	Rp 9,000	Rp 30,000	
37	a. Jahit Perineum derajat I b.	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
	Jahit Perineum derajat II c.	Rp 45,500	Rp 16,500	Rp 65,000	
	Jahit Perineum derajat III d.	Rp 63,000	Rp 27,000	Rp 90,000	
	Jahit Perineum derajat IV e	Rp 105,000	Rp 45,000	Rp 150,000	
	Jahit luka robek portio Pipa	Rp 210,000	Rp 90,000	Rp 300,000	
38	Rectum	Rp 17,500	Rp 7,500	Rp 25,000	
39	Pengobatan Erosi	Rp 35,000	Rp 15,000	Rp 50,000	
40	Amnioskopi	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
41	Kompresi bimanual	Rp 52,500	Rp 22,500	Rp 75,000	
42	Pengambilan sediaan mukosa	Rp 28,000	Rp 12,000	Rp 40,000	
43	Manual Placenta	Rp 70,000	Rp 30,000	Rp 100,000	
44	Askep Pasien/hari				
	a. Kelas III	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 30,000	
	b. Kelas II	Rp 24,000	Rp 12,000	Rp 36,000	
	c. Kelas I	Rp 36,000	Rp 18,000	Rp 54,000	
	d. Bayi	Rp 40,000	Rp 20,000	Rp 60,000	
45	RJP	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 120,000	
46	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)				
	a. BMHP kecil	Rp 6,000	Rp 4,000	Rp 10,000	
	b. BMHP sedang	Rp 9,000	Rp 6,000	Rp 15,000	
	c. BMHP besar	Rp 18,000	Rp 12,000	Rp 30,000	
	d. Oksigen 1 Ltr/ Menit	Rp 240	Rp 240	Rp 600	
	e. Blue light/hr	Rp 60,000	Rp 90,000	Rp 150,000	

TARIF BEDAH UMUM, BEDAH UROLOGI, THT

No	Uraian	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Ket
1	Operasi Khusus	Rp 3,778,000	Rp 3,340,000	Rp 2,902,000	
2	Operasi Besar	Rp 2,902,000	Rp 2,683,000	Rp 2,464,000	
3	Operasi Sedang	Rp 2,240,000	Rp 2,021,000	Rp 1,583,000	

1	Operasi	Rp 4,914,000	Rp 4,496,000	Rp 3,869,000	
---	---------	--------------	--------------	--------------	--

Catatan :

1. Tarif diatas belum termasuk pemakaian obat anestesi pemakaian alkes/matkes, alat Implant
2. Operasi Cito / Emergency : tarif diatas ditambah 25 %
3. Tarif ditambah 30 % apabila operator membawa asisten opr/Co-as

TARIF OPERASI MATA

No	Uraian	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Ket
1	Operasi Sedang	Rp 1,851,500	Rp 1,668,000	Rp 1,484,500	
2	Oparasi Besar	Rp 2,035,000	Rp 1,851,500	Rp 1,484,500	
3	Operasi Khusus	Rp 2,585,500	Rp 2,402,000	Rp 2,035,000	

Catatan :

- Tarif diatas belum termasuk obat anestesi Pemakaian alkes/matkes, alat Implant / IOL

TARIF OPERASI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Uraian	Kelas I	Kelas VIP	Kelas III	Ket
1	Operasi Khusus	Rp 4,500,000	Rp 5,000,000		
2	Oparasi Besar	Rp 3,500,000	Rp 4,000,000		
3	Operasi Sedang	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000		
4	Partus Normal Dokter	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000		
5	Partus Normal Bidan	Rp 500,000	Rp 1,000,000		

Catatan :

1. Tarif diatas belum termasuk, pemakaian obat anestesi Pemakaian alkes/matkes, alat Implant
2. Operasi cito/emergency : tarif diatas ditambah 25 %
3. Tarif ditambah 30 % apabila operator membawa asisten operator
4. Jasa dokter Spesialis Anak 20 % dari operator

No	Urutan	Pelayanan	Ruman Sakit	Rembesi	
		Hematologi			
1	Darah lengkap	24,000	36,000	Rp	60,000
2	Haemoglobin	10,000	15,000	Rp	25,000
3	Leukosit	10,000	15,000	Rp	25,000
4	LED	10,000	15,000	Rp	25,000
5	Diff Count	10,000	15,000	Rp	25,000
6	Hematokrit	10,000	15,000	Rp	25,000
7	Trombosit	10,000	15,000	Rp	25,000
8	Eosinofil	10,000	15,000	Rp	25,000
9	Retikolosit	10,000	15,000	Rp	25,000
10	Malaria	8,000	12,000	Rp	20,000
11	Waktu Pendarahan	4,000	6,000	Rp	10,000
12	Waktu Pembekuan	4,000	6,000	Rp	10,000
13	Gol Darah + (Abo)	8,000	12,000	Rp	20,000
14	MDT (Morfologi darah tepi)	20,000	30,000	Rp	50,000
		Urinalisa			
1	Protein, Reduksi, Urobilin, Bilirubin	10,000	15,000	Rp	25,000
2	Sedimen	10,000	15,000	Rp	25,000
3	Test Kehamilan	6,000	9,000	Rp	15,000
		Faeces			
1	Faeces Rutin	10,000	15,000	Rp	25,000
2	Bensidine test/darah samar	10,000	15,000	Rp	25,000
		Kimia Darah			
1	Bilirubin total	12,000	18,000	Rp	30,000
2	Bilirubin Direk	12,000	18,000	Rp	30,000
3	Bilirubin Indirec	12,000	18,000	Rp	30,000
4	Protein Total	8,000	12,000	Rp	20,000
5	Albumin	10,000	15,000	Rp	25,000
6	Globulin	8,000	12,000	Rp	20,000
7	Gama GT	14,000	21,000	Rp	35,000
8	SGOT	12,000	18,000	Rp	30,000
9	SGPT	12,000	18,000	Rp	30,000
10	Cholesterol	10,000	15,000	Rp	25,000
11	Trygliseride	10,800	16,200	Rp	27,000

12	Ureum	10,000	15,000	Rp	25,000	
13	Creatinin	10,000	15,000	Rp	25,000	
14	Asam Urat	10,000	15,000	Rp	25,000	
15	Gula Darah Puasa	10,000	15,000	Rp	25,000	
16	GDP / 2J PP / Sewaktu	10,000	15,000	Rp	25,000	
17	HDL Chol	12,000	18,000	Rp	30,000	
18	LDL Chol	12,000	18,000	Rp	30,000	
	Serologi Dan Imunorologie					
1	Widal	24,000	36,000	Rp	60,000	
2	VDRL	24,000	36,000	Rp	60,000	
3	HBs Ag Kualtitat	24,000	36,000	Rp	60,000	
4	IgG IgM Dengue	80,000	120,000	Rp	200,000	
5	HIV/B20/	120,000	180,000	Rp	300,000	Per Rapi 100.000
	Elektrolit					
1	Na K Cl	60,000	90,000	Rp	150,000	
	Bakteriologi / Jamuar					
1	BTA 1 X (1 Paket)	12,000	18,000	Rp	30,000	
2	Cat Gram	8,000	12,000	Rp	20,000	
3	KOH 10 Gr	8,000	12,000	Rp	20,000	
	Narkoba					
1	Pemeriksaan Narkoba 1 Paket	130,000	195,000	Rp	325,000	
2	Amphetamine	26,000	39,000	Rp	65,000	
3	Morf Opiate	26,000	39,000	Rp	65,000	
4	Cannabis Noids/THC	26,000	39,000	Rp	65,000	
5	Benzodiasep	26,000	39,000	Rp	65,000	
6	Methampetamin	26,000	39,000	Rp	65,000	

TARIF RADIOLOGI

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	Limbah Padat	6,000	4,000	Rp 10,000	per kg
2	Limbah Cair	6,000	4,000	Rp 10,000	per kg

TARIF FOGGING / PENYEMPROTAN NYAMUK

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	1 RT / 40 Rumah	60,000	40,000	Rp 100,000	per kg

1	Sewa Kamar Jenazah > 6 Jam	60,000	40,000	Rp 100,000	
2	Pelayanan Jenazah				
	a. Muslim				
	1) Dewasa	300,000	200,000	Rp 500,000	
	2) Anak usi 1 - 13 Tahun	240,000	160,000	Rp 400,000	
	3) Anak usi 0 - 11 Tahun	240,000	160,000	Rp 400,000	
	b. Non Muslim				
	1) Dewasa	120,000	80,000	Rp 200,000	
	2) Anak usi 1 - 13 Tahun	90,000	60,000	Rp 150,000	
	3) Anak usi 0 - 11 Tahun	60,000	40,000	Rp 100,000	
3	Pemakaian formalin				
	a. Tahan selama 1 minggu	720,000	480,000	Rp 1,200,000	
	b. Tahan selama 3 hari	180,000	120,000	Rp 300,000	
4	Pemakaian Peti				sesuai harga toko
5	Freezer 1 hari	120,000	80,000	Rp 200,000	

TARIF DIKLAT

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi	Ket
1	PKL/Magang/Orientase				
	SMK	2,500	7,500	Rp 10,000	Per hari
	DIII	3,750	11,250	Rp 15,000	Per hari
	S1	5,000	15,000	Rp 20,000	Per hari
2	Mencari data S1	37,500	112,500	Rp 150,000	Per Tiga Hari
3	Mencari data S2	50,000	150,000	Rp 200,000	Per Tiga Hari
4	Penelitian	87,500	262,500	Rp 350,000	Per Minggu

RINCIAN BIAYA KAMAR OPERASI

No	Uraian	Jasa Pelayanan	Jasa Rumah Sakit	Tarif Retribusi
1	Opr. Khusus	Rp 3,600,000	Rp 900,000	Rp 4,500,000
2	Opr. Besar	Rp 2,800,000	Rp 700,000	Rp 3,500,000
3	Opr. Sedang	Rp 2,000,000	Rp 500,000	Rp 2,500,000

Catatan:

1. Tarif diatas belum termasuk obat-obatan/Implant
2. Untuk gawat / cito ditambah 25 % dari tarif
3. Untuk multiple operasi, operasi ke dua Jasa operator ditambah 60 % dari tarif operator

No	Kategori	Pelayanan	Ruang Saku	Ruang Saku	Ruang Saku
	Ambulance :				
1	A. Luar Daerah				
	1. Ambon - Piru	660,000	Rp 440,000	Rp 1,100,000	
	2. Ambon - Maschi	780,000	Rp 520,000	Rp 1,300,000	
2	B. Luar Kota Dalam Kabupaten				
	1. Kota Piru	30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	1. Pelita Jaya	90,000	Rp 60,000	Rp 150,000	
	2. Kawa	120,000	Rp 80,000	Rp 200,000	
	3. Taniwel	342,000	Rp 228,000	Rp 570,000	
	4. Buria	450,000	Rp 300,000	Rp 750,000	
	5. Hulung	420,000	Rp 280,000	Rp 700,000	
	6. Kasieh	432,000	Rp 288,000	Rp 720,000	
	7. Nukuhay	450,000	Rp 300,000	Rp 750,000	
	8. Pasinalo	456,000	Rp 304,000	Rp 760,000	
	9. Sohuwe	468,000	Rp 312,000	Rp 780,000	
	10. Lumahlatal	474,000	Rp 276,000	Rp 790,000	
	11. Hatunuru	480,000	Rp 320,000	Rp 800,000	
	12. Matapa	486,000	Rp 324,000	Rp 810,000	
	13. Sukaraja	492,000	Rp 328,000	Rp 820,000	
	14. Lumahpelu	498,000	Rp 332,000	Rp 830,000	
	15. Uwen Pante	504,000	Rp 344,000	Rp 840,000	
	16. Walakone	516,000	Rp 344,000	Rp 860,000	
	17. Katapanhg	222,000	Rp 148,000	Rp 370,000	
	18. Masika	150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	19. Waisala	240,000	Rp 160,000	Rp 400,000	
	20. Mata Ampa	30,000	Rp 20,000	Rp 50,000	
	21. Morekau	42,000	Rp 28,000	Rp 70,000	
	22. Lumoli	48,000	Rp 32,000	Rp 80,000	
	23. Eti	36,000	Rp 26,000	Rp 60,000	
	24. Waisarisa	138,000	Rp 92,000	Rp 230,000	
	25. Nurue	150,000	Rp 100,000	Rp 250,000	
	26. Waisamu	180,000	Rp 120,000	Rp 300,000	
	27. Waihatu	186,000	Rp 124,000	Rp 310,000	

29. Waipirit	222,000	Rp 148,000	Rp 370,000
30 Waimital	222,000	Rp 148,000	Rp 370,000
31. Kairatu	240,000	Rp 160,000	Rp 400,000
32. Urau	252,000	Rp 168,000	Rp 420,000
33.Kawatu	258,000	Rp 172,000	Rp 430,000
34. Amaina	270,000	Rp 180,000	Rp 450,000
35. Sukawati	282,000	Rp 188,000	Rp 470,000
36. Hunitetu	300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
37.Waiselan	246,000	Rp 164,000	Rp 410,000
38. Wasralohi	252,000	Rp 168,000	Rp 420,000
39.Kamarian	300,000	Rp 200,000	Rp 500,000
40. Tihulale	336,000	Rp 210,000	Rp 560,000
41. Rumah Kai	348,000	Rp 242,000	Rp 580,000
42. Latu	480,000	Rp 320,000	Rp 800,000
43. Huwaloi	486,000	Rp 324,000	Rp 810,000
44. Tala	510,000	Rp 340,000	Rp 850,000

1	Konvensional Non Kontras	Rp 21,000	Rp 49,000	Rp 70,000
2	Thorax PA/AP	Rp 44,000	Rp 77,000	Rp 110,000
3	Thorax + Lateral	Rp 28,000	Rp 49,000	Rp 70,000
4	Top Lordotik	Rp 30,000	Rp 52,500	Rp 75,000
5	Ekstremitas Atas Dex/Sin	Rp 48,000	Rp 84,000	Rp 120,000
6	Ekstremitas Atas Bilateral	Rp 32,000	Rp 56,000	Rp 80,000
7	Ekstremitas Bawah Bilateral	Rp 52,000	Rp 91,000	Rp 130,000
8	Vert Cervikalis AP/AT	Rp 36,000	Rp 66,500	Rp 95,000
9	Vert Cervikalis 4 Posisi	Rp 64,000	Rp 112,000	Rp 160,000
10	Vert Thorakalis AP/AT	Rp 40,000	Rp 70,000	Rp 100,000
11	Vert Lumbal AP/AT	Rp 40,000	Rp 70,000	Rp 100,000
12	Vert Lumbalis 4 Posisi	Rp 68,000	Rp 119,000	Rp 170,000
13	Coccygis LAT/AP	Rp 26,000	Rp 45,500	Rp 66,000
14	Pelvis	Rp 28,000	Rp 49,000	Rp 70,000
15	Abdomen Polos AP/Lateral	Rp 28,000	Rp 49,000	Rp 70,000
16	Abdomen 3 Posisi	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
17	Scedell AP + Lateral	Rp 40,000	Rp 70,000	Rp 100,000
18	Waters	Rp 28,000	Rp 49,000	Rp 70,000
19	Sinus Paranasal 3 Posisi	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
20	Tempuro Mandibulae Joint	Rp 40,000	Rp 70,000	Rp 100,000
21	Mastoid Air Cell	Rp 40,000	Rp 70,000	Rp 100,000
22	Os Mandibulae	Rp 30,000	Rp 52,500	Rp 75,000
23	Orbita	Rp 28,000	Rp 49,000	Rp 70,000
24	Os Nasal	Rp 128,000	Rp 224,000	Rp 320,000
25	Bone Survey	Rp 32,000	Rp 56,000	Rp 80,000
26	Bone Age	Rp 36,000	Rp 63,000	Rp 90,000
27	Panoramic	Rp 120,000	Rp 210,000	Rp 300,000
28	C-Arm Tanpa Expertise	Rp 140,000	Rp 245,000	Rp 350,000
29	C-Arm dengan Expertise	Rp 10,000	Rp 17,500	Rp 25,000
30	Dental / Periapical			
	Konvensional dengan Kontras (Tidak Termasuk Media Kontras)			
1	BNO - IVP	Rp 148,000	Rp 259,000	Rp 370,000
2	Uretrografi	Rp 76,000	Rp 133,000	Rp 190,000
3	RPG	Rp 116,000	Rp 203,000	Rp 290,000
4	Cystografi	Rp 70,000	Rp 122,500	Rp 175,000
5	Oesophegografi	Rp 100,000	Rp 175,000	Rp 250,000
6	OMD	Rp 148,000	Rp 259,000	Rp 370,000
7	Follow Through (Barium Meal)	Rp 148,000	Rp 259,000	Rp 370,000
8	Collon in loop (Barium enema)	Rp 148,000	Rp 259,000	Rp 370,000
9	Fistulografi	Rp 64,000	Rp 112,000	Rp 160,000
10	Penambahan Film/lambar Pemeriksaan dengan USG	Rp 10,000	Rp 17,500	Rp 25,000
1	USG Abdomen	Rp 100,000	Rp 175,000	Rp 250,000
2	USG Abdomen Atas	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
3	USG Abdomen Bawah	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
4	USG Ginjal	Rp 80,000	Rp 140,000	Rp 200,000
5	USG Thorax	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
6	USG Mammae	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
7	USG Thyroid	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
8	USG Testis	Rp 60,000	Rp 105,000	Rp 150,000
9	Penambahan Film US/ibr	Rp 8,000	Rp 14,000	Rp 20,000

2	Kepala + Bona Sai	Rp 200,000	Rp 350,000	Rp 500,000	
3	Sinus Paranasal	Rp 240,000	Rp 420,000	Rp 500,000	
4	Nasofaring	Rp 200,000	Rp 350,000	Rp 500,000	
5	Laring	Rp 240,000	Rp 420,000	Rp 500,000	
6	Soft Tissue jahar	Rp 240,000	Rp 420,000	Rp 500,000	
7	Orbita	Rp 320,000	Rp 560,000	Rp 600,000	
8	Thorax			Rp 800,000	
	Kelompok II	Rp 240,000	Rp 420,000	Rp 600,000	
1	Abdomen atas/bawah	Rp 240,000	Rp 420,000	Rp 600,000	
2	Vert lumbal	Rp 200,000	Rp 350,000	Rp 500,000	
3	Pelvis	Rp 240,000	Rp 420,000	Rp 500,000	
4	Whole Abdomen	Rp 24,000	Rp 42,000	Rp 60,000	
5	Penambahan film/lembar	Rp 6,000	Rp 10,500	Rp 15,000	
6	CD				

RINCIAN BIAYA KAMAR OPERASI MATA

No	Uraian	Jasa Operator	Instrumen Tator	Sewa OK	Sewa Alat Miskroskop	On Loop	RS	Jumlah
1	Opr. Khusus							
	Kelas I	Rp 1,300,000	Rp 195,000	Rp 455,000	Rp 200,000	Rp 45,500	Rp 390,000	Rp 2,5
	Kelas II	Rp 1,200,000	Rp 180,000	Rp 420,000	Rp 200,000	Rp 42,000	Rp 360,000	Rp 2,4
	Kelas III	Rp 1,000,000	Rp 150,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 35,000	Rp 300,000	Rp 2,0
2	Opr. Besar							
	Kelas I	Rp 1,000,000	Rp 150,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 35,000	Rp 300,000	Rp 2,0
	Kelas II	Rp 900,000	Rp 135,000	Rp 315,000	Rp 200,000	Rp 31,500	Rp 270,000	Rp 1,8
	Kelas III	Rp 700,000	Rp 105,000	Rp 245,000	Rp 200,000	Rp 24,500	Rp 210,000	Rp 1,7
3	Opr. Sedang							
	Kelas I	Rp 900,000	Rp 135,000	Rp 315,000	Rp 200,000	Rp 31,500	Rp 270,000	Rp 1,8
	Kelas II	Rp 800,000	Rp 120,000	Rp 280,000	Rp 200,000	Rp 28,000	Rp 240,000	Rp 1,6
	Kelas III	Rp 700,000	Rp 105,000	Rp 245,000	Rp 200,000	Rp 24,500	Rp 210,000	Rp 1,6

Catatan :

Biaya operasi tersebut belum termasuk :

1. Obat Anestesi
2. Pemakaian Alkes Matkes
3. Alat Implant
4. IOL Rp. 1.500.000,-
5. Phacoemulsifikasi Rp. 1.000.000,-

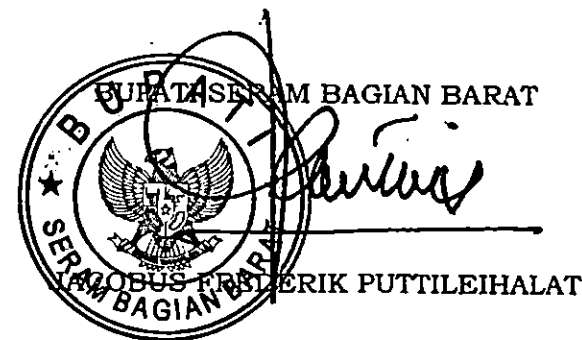
RINCIAN BIAYA KAMAR OPERASI OBSGYN

No	Uraian	Jasa Operator	Jasa dr. Anestesi	Penata Anestesi	Instrumen Tator	Asisten Operator	Bidan	Sewa OK / VK	Linen	On Loop	RS
1	Opr. Khusus										
	Kelas I	Rp 1,700,000	Rp 510,000	Rp 153,000	Rp 170,000	Rp 85,000		Rp 510,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 510,000
	Kelas II	Rp 1,500,000	Rp 450,000	Rp 135,000	Rp 150,000	Rp 75,000		Rp 450,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 450,000
	Kelas III	Rp 1,300,000	Rp 390,000	Rp 117,000	Rp 130,000	Rp 65,000		Rp 390,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 390,000
2	Opr. Besar										
	Kelas I	Rp 1,500,000	Rp 450,000	Rp 135,000	Rp 150,000	Rp 75,000	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 450,000
	Kelas II	Rp 1,300,000	Rp 390,000	Rp 117,000	Rp 130,000	Rp 65,000	Rp 130,000	Rp 390,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 390,000
	Kelas III	Rp 1,100,000	Rp 330,000	Rp 99,000	Rp 110,000	Rp 55,000	Rp 110,000	Rp 330,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 330,000
3	Opr. Sedang										
	Kelas I	Rp 1,000,000	Rp 300,000	Rp 90,000	Rp 100,000	Rp 50,000		Rp 300,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 300,000
	Kelas II	Rp 900,000	Rp 270,000	Rp 81,000	Rp 90,000	Rp 45,000		Rp 270,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 270,000
	Kelas III	Rp 700,000	Rp 210,000	Rp 63,000	Rp 70,000	Rp 35,000		Rp 210,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 210,000
4	Partus Normal										
	a. Dokter										
	Kelas I	Rp 700,000					Rp 70,000	Rp 210,000	Rp 25,000		Rp 210,000
	Kelas II	Rp 600,000					Rp 60,000	Rp 180,000	Rp 25,000		Rp 180,000
	Kelas III	Rp 500,000					Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 25,000		Rp 150,000
	b. Bidan										
	Kelas I						Rp 400,000	Rp 120,000	Rp 25,000		Rp 120,000
	Kelas II						Rp 300,000	Rp 90,000	Rp 25,000		Rp 90,000
	Kelas III						Rp 250,000	Rp 75,000	Rp 25,000		Rp 75,000

No	Uraian	Jasa Operator	Jasa dr. Anestesi	Penata Anestesi	Instrumen Tator	Asisten Operator	Bidan	Sewa OK / VK	Linen	On Loop	RS	Jumlah
5	Partus dengan tindakan											
	Kelas I	Rp 900,000					Rp 90,000	Rp 270,000	Rp 20,000		Rp 270,000	Rp 1,550,000
	Kelas II	Rp 750,000					Rp 75,000	Rp 225,000	Rp 20,000		Rp 225,000	Rp 1,295,000
	Kelas III	Rp 600,000					Rp 60,000	Rp 180,000	Rp 20,000		Rp 180,000	Rp 1,040,000
6	Curretage											
	Kelas I	Rp 700,000					Rp 70,000	Rp 210,000	Rp 20,000		Rp 210,000	Rp 1,210,000
	Kelas II	Rp 600,000					Rp 60,000	Rp 180,000	Rp 20,000		Rp 180,000	Rp 1,040,000
	Kelas III	Rp 500,000					Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 20,000		Rp 150,000	Rp 870,000

Catatan :

1. Jasa dokter Spesialis Anak 20 % dari Operator
 2. Curetase di Kamar operasi jasa instrumentator, Asisten operator dan onloop merupakan hak Bidan
 3. Tarif diatas belum termasuk obat-obatan
 4. Untuk gawat/cito ditambah 25 % dari tarif
 5. Untuk multiple operasi, operasi ke dua ditambah 60 % dari tarif
- Jasa Bidan pada operasi besar hanya untuk operasi SC



Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah berdasarkan luas bangunan :

Luas	Tarif
- Lebih kecil atau sama dengan 21 m ²	Rp. 2.000,- / bulan
- 22 m ² sampai dengan 70 m ²	Rp. 3.500,- / bulan
- 71 m ² sampai dengan 200 m ²	Rp. 4.500,- / bulan
- 201 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp. 6.000,- / bulan
- Diatas 300 m ²	Rp. 7.500,- / bulan

Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari kategori perkantoran, pasar, pertokoan, gedung pertunjukkan, apotik, klinik, usaha pertukangan/pengolahan bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :

Volume	Tarif
- Lebih kecil dari 0,50 m ³ /hari	Rp. 25.000,- / bulan
- 0,51 m ³ sampai dengan 0,75 m ³ / hari	Rp. 35.000,- / bulan

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan sebagai berikut:


- a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari sumber sampah, lembaga pendidikan/kursus, rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel, pabrik/industri, rumah sakit/ rumah bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi :

Volume	Tarif
- Lembaga Pendidikan / Kursus	Rp. 6.000,- / m ³ /bulan
- Rumah sewaan / tempat kos	Rp. 7.500,- / m ³ /bulan
- Rumah Makan	Rp. 11.000,- / m ³ /bulan
- Restoran	Rp. 15.000,- / m ³ /bulan
- Hotel / Apartemen	Rp. 15.000,- / m ³ /bulan
- Rumah Sakit / Rumah Bersalin	Rp. 10.000,- / m ³ /bulan

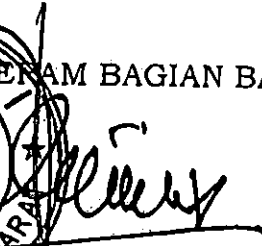
Jenis	Tarif
- Kios	Rp. 1.000,- / hari
- Los	Rp. 1.000,- / hari
- Awning	Rp. 1.000,- / hari
- Kaki lima / pedagang makanan tidak menetap.	Rp. 1.000,- / hari
- Ruko.	Rp. 3.000,- / hari
- Toko	Rp. 2.500,- / hari

Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk menentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,- /rit.

Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Daerah oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,- /m³.



 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



 JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT

TENTANG : Struktur Dan Besaran Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi
Jalan Umum.

a. Parkir Biasa.

JENIS	TARIF
a. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 1000 / sekali parkir
b. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 2000 / sekali parkir
c. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini bus dan sejenisnya	Rp. 3000 / sekali parkir
d. Kendaraan Bus	Rp. 4000 / sekali parkir
e. Kendaraan Mobil Barang Roda Empat	Rp. 5000/ sekali parkir
f. Kendaraan Mobil Barang Roda Enam	Rp. 7000 / sekali parkir

b. Parkir Berlangganan.

JENIS	TARIF
a. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 15.000 / Tahun
b. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 50.000 / Tahun
c. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini bus dan sejenisnya	Rp. 75.000 / Tahun
d. Kendaraan Bus	Rp. 100.000 / Tahun
e. Kendaraan Mobil Barang Roda Empat	Rp. 120.000/ Tahun
f. Kendaraan Mobil Barang Roda Enam	Rp. 150.000/ Tahun


JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT

a. Pasar Tradisional

- 1) Kios = Rp. 8500/m²/Bulan
- 2) Los = Rp. 1000/m²/hari
- 3) Pelataran Pasar = Rp. 1000/m²/hari

b. Pemakaian Fasilitas Penunjang Pasar Tradisional

1) Fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK)

- a) buang air kecil = Rp. 1000
- b) buang air besar = Rp. 2000
- c) mandi/mencuci = Rp. 5000

2) Keperluan air untuk kepentingan umum dan keperluan lain-lain


- a) Kurang dari 1 meter³ (satu meter kubik) = Rp. 3000
- b) Pemakaian 1 meter³ (satu meter kubik) = Rp. 5000


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS-FREDERIK PUTTLEIHALAT

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS-PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1.	Buku Uji	Rp. 10.000,-
2.	Tanda Uji t Unit	Rp. 10.000,-
3.	Stiker / Tanda Samping	Rp. 10.000,-
4.	Jasa Pemeriksaan :	
	a. Uji Berkala :	
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 23.000,-
	- Angkot / Oplet	Rp. 25.000,-
	- Mobil Bis 9 seat s/d 28 seat	Rp. 30.000,-
	- Mobil Bis > 28 seat sebesar	Rp. 30.000,-
	- Pick Up, Light Truck < 5.500 Kg	Rp. 25.000,-
	- Dump Truck 5.500 - 15.000 Kg	Rp. 35.000,-
	- Tronton > 15.000 Kg	Rp. 50.000,-
	- Mobil Tanki	Rp. 25.000,-
	- Tractor Head	Rp. 50.000,-
	- Kereta Tempelan	Rp. 35.000,-
	- Kereta Gandengan	Rp. 35.000,-
	b. Uji berkala Pertama / Kendaraan baru :	
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 33.000,-
	- Angkot / Oplet	Rp. 33.000,-
	- Mobil Bis 9 seat s/d 28 seat	Rp. 35.000,-
	- Mobil Bis > 28 seat	Rp. 40.000,-
	- Pick Up, Light Truck < 5.500 Kg	Rp. 35.000,-
	- Dump Truck 5.500 - 15.000 Kg	Rp. 45.000,-
	- Tronton > 15.000 Kg	Rp. 60.000,-
	- Mobil Tanki	Rp. 35.000,-

5.	Penggantian Buku Uji yang hilang / rusak	Rp. 25.000,-
6.	Penggantian Tanda Uji yang hilang / rusak per keeping	Rp.25.000,-


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
Jacobus Frederik Puttileihalat
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT



No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Sarana Proteksi Kebakaran :	
	I. Hidran Kebakaran	10.000.-/titik/tahun
	II. Pemercik/Spinkler	1.000.-/titik/tahun
	III. Alarm Kebakaran	
	a. Manual	2.500.-/titik/tahun
	b. Otomatis	5.000.-/titik/tahun
2.	Sarana Penyelamatan Jiwa :	
	I. Alat Pemadam Api Ringan	
	a. Jenis Air Bertekanan	
	1) Isi sampai dengan 9 Ltr	7.500.-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 9 Ltr	15.000.-/titik/tahun
	b. Jenis Busa Kimia/Chemical	
	1) Isi sampai dengan 9 Ltr	7.500.-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 9 Ltr	15.000.-/titik/tahun
	c. Jenis Busa Mekanik	
	1) Isi Sampai dengan 9 Ltr	7.500.-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 9 Ltr	15.000.-/titik/tahun
	d. Jenis Tepung Kimia Kering (DCP)	
	1) Isi sampai dengan 6 Kg	7.500.-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 6 Kg	15.000.-/titik/tahun
	e. Jenis Carbondioxida (CO ²)	
	1) Isi sampai dengan 6 Kg	7.500.-/titik/tahun
	2) Isi lebih dari 6 Kg	15.000.-/titik/tahun

Catatan :

- Biaya Pelayanan diatas tidak termasuk biaya racun api dan atau bahan lain yang dibutuhkan



TENTANG : Struktur Dan Besaran Tarif
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

NO	URAIAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Menara Telekomunikasi Seluler	2% dari NJOP Menara/tahun	



JACOBUS FREDERIK PUTTLEIHALAT